

GAMBARAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH PERMATAKU MAKASSAR

Muh. Ramdani¹, Fely Aulia Pertiwi², Ahlun Ansar^{3*}, Natalia Rantelino⁴

^{1,2,3,4}Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.

e-mail: muh.ramdani2304@gmail.com, Felyauliapertiwi2305@gmail.com,
ahlun.ansar@unm.ac.id, nataliarantelino8@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan mandat konstitusional yang bertujuan menjamin hak belajar setiap anak tanpa diskriminasi, namun implementasinya di lapangan kerap menghadapi tantangan struktural dan operasional. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Permataku Makassar, sebuah institusi yang berkomitmen menerapkan nilai-nilai inklusivitas secara holistik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2025 melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, serta studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Permataku telah berhasil mengintegrasikan prinsip inklusif ke dalam kebijakan sekolah, mulai dari sistem penerimaan siswa yang terbuka, penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang adaptif, hingga kolaborasi sinergis antara guru, psikolog, dan orang tua. Meskipun dihadapkan pada kendala keterbatasan fasilitas fisik dan sumber daya finansial, sekolah menunjukkan resiliensi melalui strategi pembelajaran yang fleksibel dan dukungan penuh dari yayasan. Disimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di sekolah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menyentuh aspek kultural dan pedagogis, sehingga layak dijadikan model *best practice* bagi pengembangan sekolah inklusif lain yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus

ABSTRACT

Inclusive education is a constitutional mandate aimed at guaranteeing every child's right to learn without discrimination. However, its implementation often faces structural and operational challenges. This research focuses on an in-depth analysis of the practice of implementing inclusive education at Permataku School in Makassar, an institution committed to implementing inclusive values holistically. Using a descriptive qualitative approach, data collection was conducted in October 2025 through participant observation, semi-structured interviews with stakeholders, and documentation studies. The research findings indicate that Permataku School has successfully integrated inclusive principles into school policies, ranging from an open student admissions system and the development of an adaptive Individual Learning Program (PPI), to synergistic collaboration between teachers, psychologists, and parents. Despite facing constraints such as limited physical facilities and financial resources, the school demonstrates resilience through flexible learning strategies and full support from the foundation. It is concluded that the implementation of inclusive education at this school is not merely administrative but also encompasses cultural and pedagogical aspects, making it a worthy model for the development of other inclusive schools that prioritize humanitarian values and social justice.

Keywords: Inclusive Education, Children with Special Needs

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan seluruh potensi kepribadian, kemampuan, serta keahlian manusia agar tumbuh secara harmonis dan optimal. Dalam perspektif kenegaraan, pendidikan bukan sekadar kebutuhan sekunder, melainkan hak asasi mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa terkecuali. Konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Amanat konstitusional ini selaras dengan tujuan besar pendirian negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bingkai keadilan sosial (Dirman et al., 2025; Sanjaya et al., 2025). Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab moral masyarakat, melainkan kewajiban mutlak negara yang harus ditunaikan. Negara harus hadir sebagai fasilitator utama dalam memastikan bahwa layanan pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik, demi terciptanya peradaban bangsa yang bermartabat dan berdaya saing global.

Sebagai manifestasi dari upaya memanusiakan manusia secara utuh, sistem pendidikan nasional harus menjamin ketersediaan akses yang inklusif dan non-diskriminatif bagi seluruh peserta didik (Amaliyah et al., 2025; Dirman et al., 2025). Tanggung jawab negara tidak berhenti pada penyediaan sekolah reguler, tetapi juga mencakup penciptaan ekosistem pendidikan yang adil dan mampu melindungi hak-hak kelompok rentan, termasuk mereka yang menyandang status sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Amaliyah et al., 2025; Ernawati et al., 2025). Dalam konteks keberagaman inilah, paradigma pendidikan inklusif hadir sebagai pendekatan strategis untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara dan bermakna sesuai dengan kebutuhan individualnya. Konsep pendidikan ini menuntut institusi sekolah untuk melakukan transformasi mendasar, mulai dari penyesuaian kurikulum, modifikasi strategi pembelajaran, hingga penataan lingkungan fisik dan sosial agar ramah serta dapat diakses oleh semua anak. Pendidikan inklusif menolak segala bentuk segregasi dan menekankan bahwa perbedaan kemampuan bukanlah hambatan, melainkan kekayaan diversitas yang harus dikelola dengan bijak dalam ruang kelas (Ernawati et al., 2025;; Hanan et al., 2025; Khotimah, 2025; Manurung et al., 2022).

Secara yuridis formal, pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang sangat kokoh dan mengikat. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit menegaskan prinsip demokratis dan berkeadilan, di mana pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun (Nashuddin, 2020; Wijaya et al., 2020). Lebih lanjut, peraturan pemerintah secara teknis telah memberikan panduan operasional mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa. Regulasi ini menekankan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi spektrum keberagaman peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, intelektual, maupun emosional. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan inklusif merupakan wujud nyata dari keadilan sosial dan demokratisasi pendidikan, di mana sistem sekolah harus menyesuaikan diri dengan kondisi anak, bukan sebaliknya anak yang dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang kaku.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia dengan cukup lengkap, realitas implementasi pendidikan inklusif di lapangan masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan multidimensi. Kesenjangan antara harapan ideal regulasi dengan praktik nyata masih sangat terasa, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia. Kompetensi guru reguler dalam

menangani dinamika Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sering kali masih terbatas, ditambah dengan minimnya ketersediaan tenaga profesional pendukung seperti guru pendamping khusus (*shadow teacher*). Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana aksesibilitas serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai esensi inklusi masih menjadi penghambat utama. Pendidikan inklusif sejatinya mensyaratkan adanya komponen pendukung yang integratif, meliputi kurikulum yang adaptif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, layanan intervensi dini, dukungan psikososial, serta fasilitas fisik yang ramah disabilitas. Tanpa terpenuhinya komponen-komponen vital tersebut secara komprehensif, program inklusi berpotensi hanya berjalan sebagai formalitas belaka dan tidak memberikan dampak signifikan bagi perkembangan peserta didik.

Di tengah tantangan nasional tersebut, Kota Makassar sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia Timur mulai menggeliat mengembangkan praktik pendidikan inklusif sebagai bentuk dukungan konkret terhadap kebijakan pusat. Salah satu institusi pendidikan yang berkomitmen menerapkan layanan ini adalah Sekolah Permataku Makassar. Sekolah ini hadir dengan visi progresif untuk mewujudkan sekolah inklusi yang mengusung konsep *SMART Education*, yang merupakan akronim dari nilai-nilai Sinergi, Mandiri, Adaptif, Ramah, dan Terdepan. Melalui visi tersebut, sekolah ini berikhtiar menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan unik setiap peserta didik. Upaya ini dilakukan dengan merancang pembelajaran yang adaptif serta membangun suasana kelas yang hangat dan ramah bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kehadiran sekolah dengan model seperti ini diharapkan dapat menjadi oase bagi orang tua yang mendambakan pendidikan berkualitas dan humanis bagi anak-anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus di wilayah perkotaan yang padat.

Namun demikian, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang beroperasi di tengah dinamika masyarakat yang kompleks, pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Permataku Makassar tentu tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan operasional. Meskipun memiliki visi yang ideal, penerapannya di lapangan membutuhkan konsistensi kebijakan internal dan dukungan sumber daya yang besar. Tantangan tersebut dapat mencakup aspek kualitas pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung yang spesifik, hingga keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan anak. Selain itu, hambatan teknis dan non-teknis lainnya, seperti manajemen kelas yang heterogen dan koordinasi dengan tenaga ahli eksternal, juga menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan. Kesenjangan antara konsep *SMART Education* yang dicanangkan dengan realitas interaksi di ruang kelas menjadi area yang menarik untuk dikaji lebih dalam guna memastikan bahwa label inklusi yang disandang benar-benar terimplementasi dalam praktik nyata.

Berangkat dari latar belakang permasalahan dan dinamika tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan guna memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai potret implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Permataku Makassar. Penelitian ini dirancang untuk membedah secara mendalam berbagai aspek krusial, mulai dari kebijakan sekolah, pelaksanaan pembelajaran di kelas, ketersediaan fasilitas, hingga pola keterlibatan orang tua dan tantangan riil yang dihadapi para pendidik. Nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis evaluatif yang menyeluruh terhadap penerapan konsep *SMART Education* dalam *setting* pendidikan inklusif lokal. Hasil dari kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi pengembangan model pendidikan inklusif yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan, sehingga hak setiap peserta didik untuk berkembang secara optimal dapat terpenuhi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menginvestigasi dan mendeskripsikan secara komprehensif fenomena implementasi pendidikan inklusif di lingkungan sekolah. Pendekatan ini dipilih secara strategis karena kemampuannya dalam memotret realitas objektif di lapangan secara utuh, mendalam, dan alamiah tanpa adanya intervensi atau manipulasi variabel oleh peneliti terhadap subjek yang diteliti. Fokus utama studi diarahkan pada bagaimana sistem pendidikan inklusif dioperasionalkan dalam ekosistem sekolah, mencakup dinamika interaksi sosial antarwarga sekolah serta strategi pembelajaran yang diterapkan bagi peserta didik yang beragam. Lokasi penelitian dipusatkan di Sekolah Permataku Makassar, sebuah institusi pendidikan yang menjadi model penerapan inklusi di wilayah tersebut. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Oktober 2025, yang dirancang bertepatan dengan kegiatan observasi lapangan untuk mata kuliah Model-Model Satuan Pendidikan. Melalui desain deskriptif ini, peneliti berupaya menggali data empiris langsung dari sumber aslinya untuk memberikan gambaran faktual mengenai kesiapan sekolah, kompetensi tenaga pendidik, serta iklim akademik yang terbangun, sehingga dapat dipahami bagaimana sekolah tersebut mengakomodasi kebutuhan belajar siswa reguler dan berkebutuhan khusus secara berdampingan dalam satu lingkungan belajar yang harmonis.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara intensif melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi guna menjamin kelengkapan informasi. Observasi dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati interaksi sosial yang terjadi antara guru, siswa reguler, dan *Anak Berkebutuhan Khusus* (ABK), serta untuk menilai kelayakan fasilitas fisik dan sarana prasarana sekolah dalam mendukung aksesibilitas layanan pendidikan inklusif. Selanjutnya, wawancara dengan format *semi-terstruktur* dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan, guru kelas, dan *Guru Pembimbing Khusus* (GPK). Instrumen pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai kebijakan internal, strategi pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta kendala operasional yang dihadapi. Selain itu, peneliti menghimpun data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap arsip-arsip akademik dan administratif. Dokumen yang dianalisis secara cermat meliputi profil institusi, struktur kurikulum, *Rencana Pelaksanaan Pembelajaran* (RPP) modifikasi, dokumen *Program Pembelajaran Individual* (PPI), serta dokumentasi visual kegiatan. Integrasi ketiga teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang saling melengkapi (*triangulasi*) mengenai praktik pendidikan inklusif di Sekolah Permataku Makassar.

Tahapan analisis data dilaksanakan secara sistematis menggunakan model analisis kualitatif deskriptif yang mengacu pada kerangka kerja interaktif Miles dan Huberman. Proses ini mencakup tiga alur kegiatan yang berjalan simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti melakukan seleksi ketat, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan untuk memisahkan informasi yang relevan dengan tema implementasi inklusi dari data yang tidak perlu. Data yang telah terorganisasi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang logis (*data display*) untuk memudahkan pemahaman terhadap pola temuan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menyintesis seluruh temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Guna menjamin keabsahan dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik *triangulasi sumber* dan *triangulasi metode* secara ketat. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan konsistensi informasi dari berbagai informan yang berbeda serta mengecek kesesuaian antara hasil observasi, wawancara, dan isi dokumen tertulis.

Prosedur validasi ini memastikan bahwa deskripsi yang dihasilkan bersifat akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai representasi kondisi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kebijakan dan Legalitas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Sekolah Permataku Makassar telah menetapkan landasan kebijakan yang kuat sebagai institusi pendidikan yang menerapkan sistem inklusi dengan dukungan penuh dari pihak yayasan. Sekolah ini memiliki pedoman internal serta panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menjadi acuan utama bagi seluruh warga sekolah dalam memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Visi utama sekolah, yaitu terwujudnya sekolah inklusi yang mengusung konsep SMART Education (Sinergi, Mandiri, Adaptif, Ramah, dan Terdepan), menjadi arah strategis dalam setiap aktivitas akademik maupun non-akademik. Melalui visi tersebut, sekolah berupaya keras menciptakan ekosistem belajar yang mampu mendorong sinergi positif antara guru, siswa, dan orang tua, serta membentuk kemandirian peserta didik. Selain itu, kebijakan ini dirancang untuk menumbuhkan sikap adaptif terhadap perubahan dan ramah terhadap segala bentuk perbedaan, sehingga sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik dari berbagai latar belakang.

Dalam tataran praktis, prinsip inklusif di sekolah ini diwujudkan melalui proses pembelajaran yang sangat fleksibel dan berpusat pada kebutuhan individu setiap siswa. Para tenaga pendidik diberikan pembekalan dan bimbingan secara berkala agar mampu memahami karakteristik unik setiap anak, khususnya siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan penanganan spesifik. Sekolah juga menerapkan mekanisme kolaborasi yang erat antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua untuk memantau perkembangan siswa secara komprehensif. Sosialisasi mengenai urgensi pendidikan inklusif dilakukan secara rutin kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah guna menyamakan persepsi tentang pentingnya menghargai keberagaman. Dengan strategi ini, nilai-nilai SMART Education tidak hanya menjadi slogan, melainkan diterapkan secara nyata dalam interaksi sosial dan kegiatan belajar mengajar sehari-hari di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Pelaksanaan Pendidikan ABK

Dari aspek legalitas dan komitmen institusi, sekolah telah memiliki regulasi internal yang mengatur teknis penerapan pendidikan inklusif yang selaras dengan peraturan pemerintah

Copyright (c) 2025 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan

mengenai pendidikan khusus. Kebijakan ini tercermin dalam prosedur penerimaan siswa yang terbuka tanpa diskriminasi, penyusunan program pembelajaran yang dipersonalisasi, serta pengembangan kompetensi guru dalam strategi kelas inklusif. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sekolah telah menerima siswa berkebutuhan khusus dan memfasilitasi mereka dengan guru pendamping serta ruang belajar yang kondusif. Dukungan moral dan material dari yayasan juga menjadi faktor kunci yang menjamin keberlanjutan program ini. Secara keseluruhan, komitmen sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan inklusi mencerminkan pemahaman mendalam bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan siswa difabel di kelas reguler, melainkan sebuah upaya integrasi sosial dan akademik yang sistematis dan berkeadilan.

2. Manajemen Penerimaan dan Asesmen Peserta Didik Baru

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Permataku Makassar dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan kesempatan yang setara bagi seluruh calon siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sekolah tidak menerapkan sistem seleksi akademis yang kaku atau diskriminatif, melainkan lebih mengedepankan proses identifikasi dan asesmen awal untuk memetakan potensi anak. Khusus bagi calon siswa berkebutuhan khusus, terdapat tahapan prosedur yang melibatkan tim profesional yang terdiri dari dokter, psikolog, serta guru pendamping khusus. Keterlibatan para ahli ini bertujuan untuk melakukan asesmen komprehensif guna mengenali karakteristik, hambatan belajar, serta kebutuhan spesifik masing-masing anak. Dengan data asesmen yang akurat, sekolah dapat merancang layanan pendidikan yang paling sesuai dengan kondisi siswa, sekaligus berkoordinasi dengan orang tua dan terapis eksternal untuk memastikan kesinambungan dukungan antara rumah dan sekolah.

Dalam pelaksanaannya, proses penerimaan siswa lebih menitikberatkan pada kesiapan lingkungan belajar dan kemampuan sekolah dalam mengakomodasi kebutuhan calon peserta didik. Tim penerimaan sekolah melakukan wawancara mendalam dengan orang tua untuk menggali riwayat perkembangan anak, melakukan pengamatan perilaku secara langsung, serta meninjau hasil pemeriksaan medis atau psikologis sebelumnya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anak yang diterima akan mendapatkan perlakuan yang tepat sejak hari pertama sekolah. Berdasarkan data lapangan, sekolah menerima beragam jenis kebutuhan khusus, mulai dari keterlambatan bicara, ADHD, autisme, keterlambatan perkembangan global, disabilitas intelektual, disleksia, hingga sindrom Down. Setiap kategori kebutuhan ini direspons dengan pendekatan yang berbeda, baik melalui program terapi pendukung, pendampingan intensif di dalam kelas, maupun penyesuaian materi ajar agar siswa dapat berpartisipasi aktif.

Manajemen kesiswaan juga mengatur distribusi siswa berkebutuhan khusus agar pembelajaran tetap berjalan efektif dan kondusif bagi semua pihak. Saat ini, sekolah menerapkan kebijakan pembatasan rasio jumlah siswa berkebutuhan khusus di setiap kelas, dengan dukungan dua guru pendamping untuk memantau perkembangan mereka. Langkah ini diambil untuk mencegah ketimpangan perhatian guru dan memastikan setiap siswa mendapatkan pendampingan yang optimal. Selain itu, guru reguler juga dilibatkan dalam memahami profil siswa baru agar mampu menciptakan atmosfer kelas yang inklusif. Melalui manajemen penerimaan yang terencana, humanis, dan berbasis data asesmen, sekolah berhasil membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Hal ini menjadikan proses PPDB sebagai gerbang awal yang krusial dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

3. Implementasi Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Adaptif

Sekolah menerapkan strategi adaptasi kurikulum nasional dengan melakukan modifikasi yang fleksibel agar relevan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Meskipun kerangka dasarnya mengacu pada Kurikulum Merdeka, sekolah melakukan

penyesuaian pada tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar sesuai dengan potensi serta kondisi unik setiap siswa. Guru memegang peranan vital dalam menyusun Rencana Pembelajaran Individual (RPI) atau program khusus yang memastikan siswa berkebutuhan khusus tetap dapat mencapai target belajar sesuai kapasitas terbaik mereka. Modifikasi ini mencakup penyederhanaan materi ajar, alokasi waktu yang lebih fleksibel, hingga penggunaan metode instruksional yang bervariasi. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa kurikulum tidak menjadi penghambat, melainkan jembatan yang memudahkan siswa dalam mengakses pengetahuan dan mengembangkan keterampilan hidup mereka.

Proses perencanaan pembelajaran inklusif dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus, serta tim ahli seperti psikolog. Perencanaan ini selalu diawali dengan deteksi dini dan asesmen kemampuan siswa agar strategi yang dipilih benar-benar tepat sasaran. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, guru mengadaptasi metode penyampaian materi dengan menggunakan media visual, alat peraga konkret, atau aktivitas berbasis praktik langsung yang lebih mudah dipahami oleh siswa dengan hambatan kognitif atau fokus. Strategi diferensiasi ini memungkinkan siswa berkebutuhan khusus untuk tidak sekadar hadir secara fisik di kelas, tetapi juga terlibat aktif dalam proses berpikir dan berinteraksi. Guru juga secara konsisten memberikan instruksi yang jelas dan terarah, serta memberikan bantuan bertahap (scaffolding) untuk membangun kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan tugas.

Evaluasi hasil belajar dilaksanakan dengan sistem penilaian yang bersifat individual dan kualitatif, tidak semata-mata berbasis angka atau standar akademis umum. Penilaian mencakup aspek perkembangan perilaku, kemandirian, interaksi sosial, serta kemajuan akademik yang disesuaikan dengan target individu masing-masing anak. Sekolah menggabungkan teknik penilaian formatif dan sumatif yang telah dimodifikasi, di mana guru utama dan guru pendamping bekerja sama menyusun laporan perkembangan yang deskriptif. Laporan ini memberikan gambaran utuh mengenai kemajuan siswa dari waktu ke waktu. Dengan model evaluasi yang humanis ini, sekolah menciptakan iklim akademik yang menghargai setiap kemajuan kecil yang dicapai siswa, sehingga prinsip inklusif benar-benar terimplementasi dalam setiap tahapan kurikulum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian akhir.

4. Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Kualitas sumber daya manusia menjadi pilar utama dalam keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah ini, terutama melalui peran Guru Pendamping Khusus (GPK). Proses perekrutan GPK seringkali melibatkan rekomendasi dari orang tua siswa yang memahami kebutuhan spesifik anak mereka, serta melalui seleksi yang didukung oleh pihak yayasan. Sebelum bertugas, para guru pendamping maupun guru reguler mendapatkan pelatihan dan pendampingan teknis dari terapis yayasan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pemahaman dasar mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus serta strategi manajemen kelas inklusif. Dalam kesehariannya, GPK berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara materi yang disampaikan guru kelas dengan pemahaman siswa, serta membantu siswa dalam aktivitas bina diri dan sosialisasi di lingkungan sekolah.

Selain tenaga pendidik harian, sekolah juga didukung oleh tim profesional yang terdiri dari psikolog, terapis, dan tenaga medis yang terafiliasi dengan yayasan. Tim ahli ini berperan strategis dalam melakukan asesmen diagnostik, menyusun program intervensi, serta memberikan konsultasi rutin kepada guru dan orang tua. Meskipun pelatihan formal dari lembaga eksternal masih terbatas, adanya supervisi internal dari tim ahli ini sangat membantu guru dalam memecahkan masalah pembelajaran yang muncul di kelas. Sinergi antara guru kelas, guru pendamping, dan tenaga ahli menciptakan sistem pendukung yang solid. Hal ini memungkinkan setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat segera diidentifikasi dan

dicarikan solusinya secara cepat dan tepat, sehingga proses tumbuh kembang anak tidak terhambat.

Dari segi sarana dan prasarana, guru dan pihak sekolah menunjukkan kreativitas tinggi dalam menyediakan media pembelajaran yang aksesibel meskipun fasilitas fisik masih dalam tahap pengembangan. Guru secara mandiri membuat alat bantu belajar visual dan konkret seperti kartu gambar atau lembar kerja khusus yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Pihak yayasan turut mendukung pengadaan alat tulis khusus dan bahan ajar sederhana. Namun, tantangan masih terlihat pada ketersediaan infrastruktur fisik seperti jalur landai (ramp) atau toilet khusus difabel yang belum memadai, mengingat mayoritas siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini memiliki hambatan non-fisik seperti autisme atau ADHD. Meskipun demikian, sekolah terus berupaya menata lingkungan kelas yang aman, fleksibel, dan minim distraksi untuk mendukung kenyamanan belajar seluruh siswa.

5. Dinamika Kolaborasi, Evaluasi Program, dan Tantangan

Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat merupakan aspek yang masih terus diupayakan peningkatannya demi optimalisasi program inklusi. Saat ini, peran orang tua dalam penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) masih cenderung pasif dan terbatas pada penerimaan laporan perkembangan dari guru. Padahal, keterlibatan aktif orang tua sangat diperlukan untuk menyelaraskan pola asuh di rumah dengan program sekolah. Demikian pula dengan peran komite sekolah yang sejauh ini masih terbatas pada fungsi administratif dan belum menyentuh aspek substansial pendampingan program inklusi. Di sisi lain, sekolah telah menjalin kerja sama positif dengan Dinas Pendidikan setempat untuk aspek pembinaan dan pelatihan guru, meskipun kerja sama lintas sektoral dengan Dinas Sosial atau lembaga lain masih perlu diperluas untuk memperkuat jaringan dukungan.

Sistem evaluasi program pendidikan inklusif di sekolah ini dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan internal yang berkelanjutan, meskipun belum memiliki standar baku dari pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan melalui observasi harian, catatan perkembangan siswa, serta komunikasi intensif antara guru kelas dan guru pendamping. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki metode pengajaran dan penanganan perilaku siswa. Laporan perkembangan siswa, baik akademik maupun non-akademik, didokumentasikan dengan rapi sebagai arsip sekolah dan bahan laporan kepada orang tua. Meskipun pelaporan formal secara khusus ke dinas terkait belum berjalan rutin, dokumentasi internal ini menjadi bukti otentik akuntabilitas sekolah dalam mengawal perkembangan setiap peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam perjalanannya, implementasi pendidikan inklusif di sekolah ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan biaya operasional dan jumlah tenaga pendamping yang belum sebanding dengan kebutuhan. Keterbatasan dana berdampak pada belum lengkapnya fasilitas alat terapi dan media pembelajaran canggih. Selain itu, beban kerja guru yang bertambah karena harus melakukan adaptasi kurikulum dan perhatian ekstra di kelas juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, sekolah menempuh strategi kolaborasi dengan yayasan dan partisipasi orang tua dalam pengadaan alat bantu khusus. Sekolah juga terus membangun kesadaran kolektif bahwa pendidikan inklusif adalah tanggung jawab bersama, sehingga kendala sumber daya dapat diatasi melalui semangat gotong royong dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen sekolah.

Pembahasan

Analisis terhadap kebijakan dan legalitas menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Permataku Makassar telah berjalan di atas landasan filosofis dan yuridis yang kokoh. Komitmen sekolah yang selaras dengan peraturan pemerintah mengenai

pendidikan inklusif membuktikan bahwa keberhasilan inklusi tidak hanya bergantung pada instruksi birokrasi, melainkan pada visi internal institusi yang kuat. Konsep *SMART Education* yang diusung sekolah berhasil menjadi kompas moral yang mengarahkan seluruh warga sekolah untuk menerima keberagaman sebagai sebuah keniscayaan. Kebijakan ini berimplikasi pada terciptanya budaya sekolah yang tidak diskriminatif, di mana setiap kebijakan operasional, mulai dari tata tertib hingga manajemen kelas, selalu mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua siswa. Hal ini menegaskan bahwa transformasi menuju sekolah inklusif harus dimulai dari perubahan paradigma pimpinan dan yayasan yang memandang pendidikan sebagai hak asasi universal, bukan sekadar layanan akademik eksklusif untuk kelompok tertentu (Amaliyah et al., 2025; Nabila et al., 2025).

Dalam aspek penerimaan peserta didik, mekanisme asesmen diagnostik yang diterapkan sekolah memegang peranan vital sebagai gerbang awal layanan inklusif yang tepat sasaran. Pendekatan sekolah yang tidak menggunakan tes akademik kaku, melainkan mengandalkan data profil psikologis dan medis, mencerminkan pergeseran paradigma dari *student readiness* menuju *school readiness*. Artinya, sekolah yang menyesuaikan diri dengan kesiapan anak, bukan sebaliknya. Keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog dan dokter dalam proses *screening* awal memungkinkan sekolah untuk memetakan kebutuhan spesifik siswa secara akurat sejak dini. Implikasi dari strategi ini sangat signifikan karena mencegah terjadinya malpraktik pendidikan atau kesalahan penanganan di dalam kelas. Dengan data yang valid, guru dapat merancang strategi intervensi yang presisi, sehingga risiko kegagalan adaptasi siswa berkebutuhan khusus di lingkungan baru dapat diminimalisir secara efektif (Ratnaningrum et al., 2025; Sholichah & Rahayuningsih, 2025).

Implementasi kurikulum adaptif yang dijalankan sekolah menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam menerjemahkan standar nasional ke dalam praktik kelas yang humanis. Modifikasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan membuktikan bahwa standarisasi pendidikan tidak boleh membelenggu potensi unik siswa. Melalui strategi diferensiasi, guru mampu menyajikan materi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan relevan dengan kapasitas kognitif siswa berkebutuhan khusus. Penggunaan metode *scaffolding* atau pemberian bantuan bertahap menjadi bukti bahwa proses pembelajaran difokuskan pada kemajuan individual, bukan pada ketuntasan materi semata. Hal ini sejalan dengan prinsip *Universal Design for Learning* yang menekankan penyediaan berbagai cara representasi, ekspresi, dan keterlibatan. Strategi ini memastikan bahwa hambatan belajar yang dialami siswa bukan berasal dari kurikulum yang kaku, melainkan diminimalisir melalui penyesuaian instruksional yang responsif terhadap hambatan belajar masing-masing anak (Nabila et al., 2025; Wasi et al., 2025).

Sistem evaluasi dan penilaian yang diterapkan memberikan wawasan baru mengenai redefinisi keberhasilan akademik dalam konteks pendidikan inklusif. Keputusan sekolah untuk menggunakan penilaian deskriptif berbasis perkembangan individual dan meninggalkan standar ganda yang tidak adil merupakan langkah progresif. Penilaian yang memadukan aspek akademik dengan perkembangan perilaku dan kemandirian sosial memberikan gambaran yang lebih holistik tentang capaian siswa. Penyusunan *Individualized Education Program* atau program pembelajaran individual menjadi instrumen pengendali mutu yang efektif, karena target pencapaian dirumuskan berdasarkan *baseline* kemampuan siswa itu sendiri. Implikasinya, siswa tidak lagi merasa tertekan oleh kompetisi yang tidak setara dengan teman sebayanya, melainkan termotivasi untuk melampaui rekor pribadinya sendiri. Pendekatan ini menumbuhkan kepercayaan diri siswa dan menghargai setiap progres kecil sebagai sebuah prestasi yang layak dirayakan (Amaliyah et al., 2025; Gymnastiar, 2024; Hermes et al., 2021).

Peran sumber daya manusia, khususnya *shadow teacher* atau guru pendamping khusus, teridentifikasi sebagai faktor determinan utama dalam keberhasilan operasional harian kelas

inklusif. Di tengah keterbatasan fasilitas fisik yang belum sepenuhnya aksesibel, kehadiran pendamping yang kompeten mampu menjadi kompensator yang efektif. Kemampuan guru dalam menjembatani komunikasi dan memodifikasi perilaku siswa menjadi kunci terciptanya iklim kelas yang kondusif. Sinergi antara guru reguler, pendamping, dan tim ahli dari yayasan membentuk sistem pendukung berlapis yang menjamin keamanan psikologis siswa. Temuan ini mengindikasikan bahwa investasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia memiliki dampak yang lebih langsung terhadap kualitas pembelajaran inklusif dibandingkan sekadar investasi pada infrastruktur fisik (Kinasih et al., 2024; Murtadha & Fauzan, 2025). Kualitas interaksi pedagogis antara guru dan siswa adalah inti dari pendidikan inklusif yang sesungguhnya.

Meskipun banyak capaian positif, analisis juga menyoroti keterbatasan dalam aspek kolaborasi eksternal, terutama peran orang tua yang masih cenderung pasif dalam penyusunan program. Kesenjangan ini berpotensi mengurangi efektivitas intervensi, karena pendidikan inklusif menuntut konsistensi pola asuh antara sekolah dan rumah. Pasifnya orang tua sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis mengenai peran mereka dalam tim inklusi. Selain itu, keterbatasan finansial dan infrastruktur fisik seperti ketiadaan *ramp* atau toilet khusus menjadi hambatan teknis yang tidak bisa diabaikan. Kendala ini mencerminkan tantangan sistemik yang dihadapi sekolah swasta dalam membiayai layanan pendidikan khusus yang berbiaya tinggi secara mandiri. Hal ini mengimplikasikan perlunya advokasi yang lebih kuat untuk mendapatkan dukungan lintas sektoral, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, guna melengkapi sarana yang dibutuhkan.

Secara keseluruhan, model pendidikan inklusif di Sekolah Permataku Makassar menawarkan kerangka kerja yang adaptif dan dapat direplikasi, meskipun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Keberhasilan sekolah dalam mengintegrasikan visi inklusi ke dalam praktik manajemen dan pembelajaran membuktikan bahwa hambatan sumber daya dapat diatasi dengan komitmen yang kuat dan kreativitas manajerial. Tantangan yang ada, seperti partisipasi orang tua dan fasilitas fisik, harus dipandang sebagai area pengembangan strategis di masa depan. Implikasi jangka panjang dari penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukanlah sebuah destinasi akhir, melainkan sebuah proses perbaikan berkelanjutan yang menuntut evaluasi kritis dan adaptasi konstan. Dengan memperkuat kolaborasi tripusat pendidikan—sekolah, keluarga, dan masyarakat—sekolah ini memiliki potensi besar untuk menjadi model rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan yang memanusiakan manusia.

KESIMPULAN

Implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Permataku Makassar terbukti berjalan efektif berkat fondasi filosofis dan yuridis yang kokoh melalui konsep SMART Education yang berhasil menciptakan budaya sekolah nondiskriminatif. Keberhasilan ini didukung oleh pergeseran paradigma dari kesiapan siswa menuju kesiapan sekolah, yang diwujudkan melalui mekanisme asesmen diagnostik komprehensif melibatkan tenaga profesional sejak dini. Strategi ini memungkinkan pemetaan kebutuhan siswa secara akurat sehingga risiko malpraktik pendidikan dapat diminimalisir secara signifikan. Secara operasional, sekolah menerapkan kurikulum adaptif dengan strategi diferensiasi dan scaffolding yang berfokus pada kemajuan individual, didukung oleh sistem evaluasi deskriptif berbasis Individualized Education Program (IEP). Faktor determinan paling krusial dalam ekosistem ini adalah kualitas sumber daya manusia, khususnya peran guru pendamping khusus yang berfungsi sebagai kompensator efektif atas keterbatasan fasilitas. Sinergi antara kebijakan inklusif, kurikulum fleksibel, dan kompetensi pedagogik guru terbukti mampu menciptakan iklim belajar yang aman, humanis, dan suportif bagi seluruh peserta didik.

Meskipun model pendidikan inklusif ini menawarkan kerangka kerja yang adaptif dan dapat direplikasi, tantangan signifikan masih ditemukan pada aspek kolaborasi eksternal dan infrastruktur fisik yang belum memadai. Kesenjangan partisipasi orang tua dalam penyusunan program menjadi hambatan kritis karena pendidikan inklusif menuntut konsistensi pola asuh antara lingkungan sekolah dan rumah demi optimalisasi intervensi. Selain itu, keterbatasan fasilitas fisik yang aksesibel serta kendala finansial mandiri mencerminkan tantangan sistemik yang memerlukan advokasi lintas sektoral yang lebih kuat. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukanlah destinasi akhir, melainkan proses perbaikan berkelanjutan yang menuntut evaluasi kritis. Oleh karena itu, strategi masa depan harus difokuskan pada penguatan kolaborasi tripusat pendidikan untuk menutup celah yang ada. Dengan mempererat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta mengoptimalkan manajemen sumber daya yang kreatif, sekolah ini memiliki potensi besar menjadi rujukan penyelenggaraan pendidikan yang memanusiakan manusia secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, H., Oktapia, E., & Mastio, R. (2025). Kurikulum Merdeka sebagai upaya dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4738>
- Dirman, D., Kusumaningsih, W., & Ginting, R. B. (2025). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai standar proses pendidikan di SMP. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 384. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4568>
- Ernawati, E., Rasyid, M. N. A., & Mania, S. (2025). Evaluasi model CIPP pada program pendidikan inklusif di SD. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 509. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.4869>
- Gymnastiar, A. M. (2024). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. *El Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 24. <https://doi.org/10.54125/elbanar.v7i02.274>
- Hanan, A. L., Pujasmara, D. E., Sopia, R. N., Tosaini, S. P., Syahidah, S. M., & Prihantini, P. (2025). Peran kompetensi kepala sekolah dalam membangun budaya inklusif di sekolah dasar. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 277. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4216>
- Hermes, H., Huschens, M., Rothlauf, F., & Schunk, D. (2021). Motivating low-achievers—Relative performance feedback in primary schools. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 187, 45. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.04.004>
- Khotimah, K. (2025). Analisis penerapan pendidikan berbasis proyek untuk mewujudkan pendidikan inklusi di era modern. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 74. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4310>
- Kinasih, A., Hakim, M. A. R., Anggraini, N., & Sain, Z. H. (2024). Building inclusive education: Models and supporting factors in elementary schools. *Educare: Journal of Primary Education*, 5(2), 119. <https://doi.org/10.35719/educare.v5i2.284>
- Manurung, A. S., Yufiarti, Y., & Supena, A. (2022). Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Elementary School Journal PGSD FIP UNIMED*, 12(4), 308. <https://doi.org/10.24114/esjpgsd.v12i4.40456>
- Murtadha, M., & Fauzan, F. (2025). Implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar: Tantangan dan solusi. *Al-Madaris: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.47887/amd.v6i1.197>

- Nabila, A., Dwiyanti, A., Permana, D., & Mariyah, S. (2025). Ketidakpastian PDSS dan implikasinya terhadap kurikulum 2025. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 605. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4749>
- Nashuddin, N. (2020). Aktualisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam merevitalisasi pemahaman moderasi pada lembaga pendidikan di Indonesia. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 9(1), 33. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2159>
- Ratnaningrum, I., Hidayat, W., & Annisa, T. R. (2025). Analisis problematika guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus (ABK) terhadap implementasi pendidikan inklusi. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 319. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5379>
- Sanjaya, A., Fahmi, F., & Sapuadi, S. (2025). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Utara. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 299. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5385>
- Sholichah, M., & Rahayuningsih, S. (2025). Implementasi teknik scaffolding dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Balen. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1529. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6115>
- Wasi, R. A., Ismail, S., Mulyadi, Y., & Rindiani, A. (2025). Integrasi cognitive load theory dan pembelajaran multisensorik: Kerangka neuro-kognitif untuk optimalisasi pemahaman dan keterlibatan siswa di era digital. *Paedagogy: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 5(3), 1165. <https://doi.org/10.51878/paedagogy.v5i3.6532>
- Wijaya, C., Fuadi, A. H., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah pertama Kabupaten Langkat. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 162. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>